# PERUBAHAN PROSEDUR SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI

# PERUBAHAN PARADIGMA PERIZINAN BERUSAHA

| Subtansi | UU No 2 Tahun 2017 | UU No 11 Tahun 2020 | PP 14 Tahun 2021 | PP No 5 Tahun 2021 |
|---|---|---|---|---|
| **Definisi** | Pasal 1 Angka<br>Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi. | Pasal 1 Angka 4<br>Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. | Pasal 1 Angka 19<br>Perizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi adalah izin yang diberikan kepada usaha orang perseorangan atau badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi. | Pasal 1<br>1. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.<br>3. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.<br>4. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha. |

DKSDK

Activate Windows
Go to Settings to activate

# PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PUPR

PP No 5 Tahun 2021

**SUBSEKTOR**

**JASA KONSTRUKSI**

KBLI

- Jasa Konsultansi Konstruksi
- Pekerjaan Konstruksi
- Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi

Tingkat Risiko:
**MENENGAH TINGGI**

**Perizinan Berusaha Penunjang:**

- Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi;
- Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi;
- Registrasi kantor perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA);
- Lisensi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha jasa konstruksi;
- Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi jasa konstruksi;

**SUMBER DAYA AIR**

- Izin Penggunaan Sumber Daya air.

**BINA MARGA**

- Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan (Ruang Milik Jalan);
- Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan Tol

tidak memiliki Perizinan Berusaha yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko.

DKSDK

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

# PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO BERDASARKAN KBLI 2020

## PROSES PENYUSUNAN PERIZINAN

Perizinan Berusaha berdasarkan KBLI 2020 telah disusun dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, BPS, dan BSN dengan melibatkan semua kementerian / lembaga terkait dengan tahapan meliputi:

1. Pembahasan Analisis Risiko Berusaha Internal Kementerian;
2. Koordinasi dengan K/L beririsan;
3. Konsensus dengan Pengampu K3L;
4. Konsensus dengan Pelaku Usaha; dan
5. Pengesahan.

## KBLI 2020

KBLI (Klasifikasi Baku Usaha Indonesia) adalah klasifikasi rujukan yang digunakan untuk mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia ke dalam beberapa lapangan usaha/bidang usaha yang dibedakan berdasarkan jenis kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk/output baik berupa barang maupun jasa.

## KBLI DAN SUBKLASIFIKASI BIDANG KONSTRUKSI

Terdapat 1790 klasifikasi usaha pada KBLI 2020, termasuk didalamnya terdapat 68 + 2 KBLI untuk rujukan berusaha di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dari 70 KBLI terdapat 130 + 2 Subklasifikasi Usaha Jasa Konstruksi.

Activate Windows
Go to Settings to activ

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK
PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT

## STANDAR KEGIATAN USAHA

### A. STANDAR USAHA JASA KONSTRUKSI

| NO | NOMOR KBLI 41011<br>KONSTRUKSI GEDUNG HUNIAN | |
|---|---|---|
| 1 | Ruang Lingkup | a. Subklasifikasi Konstruksi Gedung Hunian<br>- Kode Subklasifikasi: BG001<br>- Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk hunian, seperti rumah tinggal, rumah tinggal sementara, rumah susun, apartemen, dan kondominium. Termasuk pembangunan gedung untuk hunian yang dikerjakan oleh perusahaan *real estate* dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung hunian.<br>- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi<br>- Sifat : Umum<br>- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) |

# SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI

SBU

Diajukan melalui Sistem OSS pada menu PB-UMKU yang terhubung SIJK terintegrasi

OSS

**Pengajuan:**
1. Permohonan Baru;
2. Perpanjangan; atau
3. Perubahan

**Tahapan:**
1. permohonan;
2. pembayaran biaya;
3. verifikasi dan validasi; dan
4. persetujuan/ penolakan permohonan

**1. PERMOHONAN :**

## KRITERIA PENILAIAN KEMAMPUAN BERUSAHA

**"Data dan dokumen persyaratan Sertifikasi Badan Usaha:"**

1. data penjualan tahunan;
2. data kemampuan keuangan/nilai aset;
3. data ketersediaan TKK;
4. data kemampuan dalam menyediakan Peralatan konstruksi; dan
5. data penerapan sistem manajemen anti penyuapan.
6. data keanggotaan asosiasi BUJK yang terdaftar di LPJK

data **penjualan tahunan**, data **ketersediaan TKK**, dan data kemampuan dalam menyediakan **peralatan** Konstruksi menggunakan **data yang telah tercatat dalam SIJK terintegrasi (SIMPAN)**.

Pasal 3 s.d 4

Activate Windo
Go to Settings to ac

PERMEN PUPR No.8 TAHUN 2022

# PROSEDUR PENILAIAN KESESUAIAN

## Kep DirJen 89/KPTS/DK/2021

Kegiatan Sertifikasi Badan Usaha subsektor Jasa Konstruksi dilakukan mencakup seleksi (tinjauan permohonan), evaluasi (Penilaian Kesesuaian Kemampuan Badan Usaha), Tinjauan terhadap hasil evaluasi, keputusan sertifikasi dan penetapan terhadap pemenuhan kriteria:

1) Penjualan Tahunan
2) Kemampuan Keuangan/Nilai Aset
3) Tenaga Kerja konstruksi
4) Kemampuan Peralatan
5) Sistem Manajemen Mutu (SMM)
6) Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

## Kep DirJen 144/KPTS/DK/2022

Kegiatan Sertifikasi Badan Usaha subsektor Jasa Konstruksi dilakukan mencakup seleksi (tinjauan permohonan), evaluasi (Penilaian Kesesuaian Kemampuan Badan Usaha), Tinjauan terhadap hasil evaluasi, keputusan sertifikasi dan penetapan terhadap pemenuhan kriteria:

1) Penjualan Tahunan
2) Kemampuan Keuangan/Nilai Aset
3) Tenaga Kerja konstruksi
4) Kemampuan Peralatan
5) Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

PERMEN PUPR NO. 8 Th. 2022 dan SK DIRJEN Bina Konstruksi No.144/KPTS/DK/2022

# Tujuan Sertifikasi

Tujuan sertifikasi adalah memberikan keyakinan kepada semua pihak bahwa BUJK telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Penilaian kesesuaian kemampuan usaha dilakukan oleh :

a. LSBU Bidang Jasa Konstruksi yang terlisensi dan

b. Personil Asesor Badan Usaha yang

   1. memiliki Kompetensi dan

   2. Tidak berpihak.

Lampiran SK DIRJEN Bina Konstruksi
No.144/KPTS/DK/2022

# Alur Proses Sertifikasi di LSBU

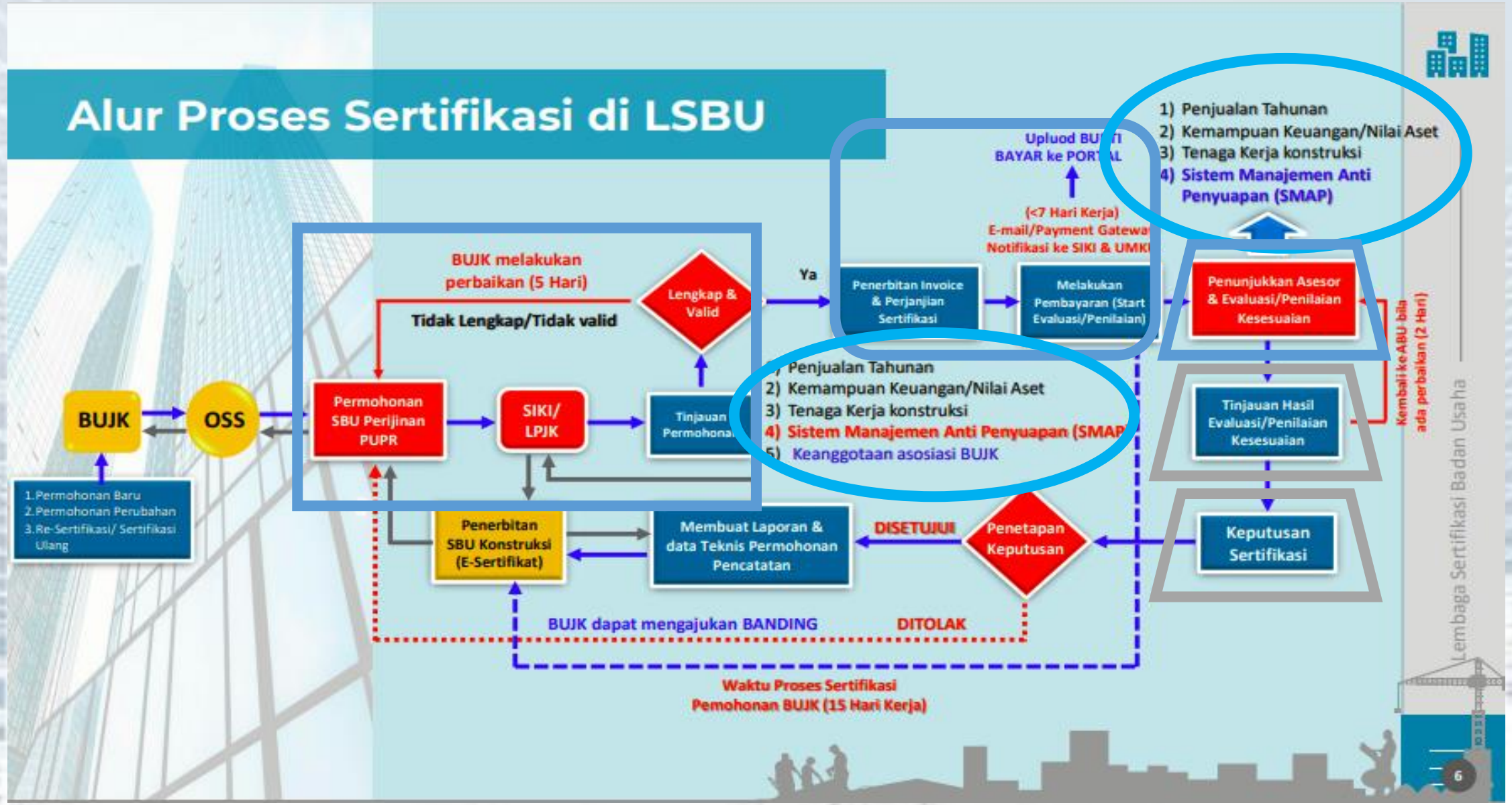


PERMEN PUPR No.8 TAHUN 2022

DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA KONSTRUKSI
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

# PEMAHAMAN TERKAIT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG JASA KONSTRUKSI

DKSDK

## Acuan Normatif

1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
4) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
5) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Lampiran SK DIRJEN Bina Konstruksi No.144/KPTS/DK/2022

6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan berusaha berbasis risiko sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi.
8) SNI ISO/IEC 17067:2013 Penilaian Kesesuaian Fundamental Sertifikasi Produk dan Panduan Skema Sertifikasi Produk.
9) SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa.
10) Keputusan Menteri PUPR Nomor 713/KPTS/M/2020 tentang Penetapan Besaran Biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi dan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Bidang Jasa Konstruksi.
11) Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 56/KPTS/DK/2021 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Khusus Master Asesor dan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi.
12) Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 144/Kpts/Dk/2022 Tentang Penetapan Standar Skema Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi

Lampiran SK DIRJEN Bina Konstruksi No.144/KPTS/DK/2022

# REFORMASI PERIZINAN BERUSAHA

| | SEMULA | MENJADI |
|---|---|---|
| **PENGATURAN** | 1. PP 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.<br>2. Permen PUPR No. 8/2019<br>3. SE Menteri PUPR No. 22/2019<br>4. Perda IUJK | 1. PP No.5 tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko<br>2. PP No.14 tahun 2021 tentang Perubahan PP.22/2020<br>3. PerMen Standar Pedoman Perizinan<br>4. NSPK Perizinan Berusaha<br>5. Perda Perizinan Beruhsaha |
| **PERSYARATAN BERUSAHA** | **Pelaku usaha harus memiliki:**<br>▪ NIB + Sertifikat (Badan Usaha / Tenaga Kerja)<br>▪ Tanda Daftar Usaha Perseorangan<br>▪ Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional<br>▪ Izin Kantor Perwakilan BUJKA dan Izin BUJKA PMA | **Nomor Induk Berusaha (NIB)**<br>+<br>Komitmen Pemenuhan Sertifkat Standar |
| **KELEMBAGAAN** | Dalam proses penerbitan Sertifikat:<br>▪ **Asosiasi Badan Usaha / Asosiasi Profesi**: melaksanakan Verifikasi dan Validasi Awal (VVA)<br>▪ **LPJK**: Melaksanakan Sertifikasi (SBU / SKKK) | Dalam proses penerbitan Sertifikat:<br>▪ **LSBU / LSP**: melaksanakan sertifikasi<br>▪ **LPJK**: melaksanakan penomoran dan pencatatan SBU/SKKK |
| **SPM LAYANAN** | ▪ IUJKN : 5 Hari kerja<br>▪ IUJK + Registrasi BUJKA : 5 Hari kerja<br>▪ SBU : Durasi VVA + 5 Hari kerja<br>▪ SKA / SKT : 20 Hari kerja<br>▪ Pembentukan LSP : 9 Bulan 10 Hari<br>▪ Pembentukan LSBU : - | ▪ IUJKN/IUJKA : Langsung mendapat izin (NIB)<br>▪ Registrasi BUJKA : 3 Hari kerja<br>▪ SBU Konstruksi : 15 Hari kerja<br>▪ SKK Konstruksi : 15 Hari kerja<br>▪ Pembentukan LSP : 65 Hari kerja<br>▪ Pembentukan LSBU : 30 Hari Kerja |

pksdm

# REFORMASI PERIZINAN BERUSAHA

| | SEMULA | MENJADI |
|---|---|---|
| **PENETAPAN KUALIFIKASI** | Penetapan kualifikasi untuk BUJK Umum dan Spesialis:<br>▪ Kontraktor: K1, K2, K3, M1, M2, B1, dan B2<br>▪ Konsultan: K1, K2, M1, M2, dan B | Penetapan kualifikasi untuk BUJK :<br>▪ BUJK Umum : K, M, dan B<br>▪ BUJK Spesialis : Tidak memiliki kualifikasi usaha |
| **PERSYARATAN KUALIFIKASI** | ▪ Pengalaman<br>▪ Kemampuan Keuangan<br>▪ Tenaga Kerja Konstruksi<br>▪ Pemenuhan Peralatan<br>} UU No.2 Tahun 2017 | ▪ Pengalaman<br>▪ Kemampuan Keuangan<br>▪ Tenaga Kerja Konstruksi<br>▪ Pemenuhan Peralatan Konstruksi (utk Kontraktor) dengan relaksasi 30 hari setelah menerima SBU |
| **PROSES PERIZINAN** | ▪ Pengajuan Izin : **Melalui OSS**<br>▪ Pengefektifan : Untuk BUJKN oleh Pemkab/Pemkot<br>Untuk BUJKA oleh Kemen PUPR<br>▪ Pengajuan SBU : Melalui Asosiasi & LPJK<br>▪ Pengajuan SKKK : Melalui USTK/Asosiasi & LPJK<br>▪ LSP : Melalui BNSP<br>▪ LSBU : - | ▪ Pengajuan Izin : **Melalui OSS**<br>▪ Pengajuan SBU : **Melalui OSS**<br>▪ Pengajuan SKKK : **Melalui OSS**<br>▪ Pengefektifan BUJKA : **Melalui OSS**<br>▪ Lisensi LSBU : **Melalui OSS**<br>▪ Rekomendasi & Lisensi LSP : **Melalui OSS** |

DKSDK

Activate Windows
Go to Settings to activate

# REFORMASI PERIZINAN BERUSAHA

| | SEMULA | MENJADI |
|---|---|---|
| **KEWAJIBAN SBU/SKKK** | Pemilik SBU/SKKK wajib:<br>▪ Melakukan registrasi untuk persubklasifikasi;<br>▪ Dilakukan periodik pertahun;<br>▪ Berbayar. | Pemilik SBU/SKKK wajib:<br>▪ Melaporkan kegiatan usaha tahunan; dan<br>▪ Tanpa biaya. |
| **WEWENANG** | ▪ Izin BUJKN: Pemerintah Kota/Kabupaten<br>▪ Izin BUJKA: Kementerian PUPR<br><br>▪ Pengawasan BUJKN: Pemerintah Kota/Kabupaten<br>▪ Pengawasan BUJKA: Kementerian PUPR | ▪ Izin BUJK (Nasional & Asing) : Pemerintah Pusat Melalui OSS, verifikasi pemenuhan komitmen oleh Kementerian PUPR<br><br>▪ Pengawasan BUJKN: Kementerian PUPR<br>▪ Pengawasan BUJKA: Kementerian PUPR |

DKSDK

Activate Windows

# 5.1. Perubahan Prosedur Permohonan Sertifikasi/ Proses Pendaftaran

a. Dalam hal Asosiasi BUJK belum memiliki sistem keanggotaan yang terintegrasi dengan SIJKT maka perlu dibuat surat pernyataan keterangan anggota asosiasi dari asosiasi yang terdaftar di LPJK.

b. Data dan dokumen persyaratan penilaian kesesuaian kemampuan usaha memuat:
   - data penjualan tahunan;
   - data kemampuan keuangan/nilai aset;
   - data ketersediaan TKK;
   - data kemampuan dalam menyediakan Peralatan konstruksi;
   - data penerapan SMAP; dan
   - **data keanggotaan asosiasi BUJK yang terdaftar di LPJK.**

c. Data penjualan tahunan, data ketersediaan TKK, dan data kemampuan dalam menyediakan peralatan Konstruksi menggunakan data yang telah tercatat dalam SIJK terintegrasi.

d. Data kemampuan keuangan/nilai aset, data penerapan sistem manajemen anti penyuapan diisi dan diunggah dokumen melalui SIJK terintegrasi.

e. Dalam hal data penjualan tahunan, data ketersediaan TKK, dan data kemampuan dalam menyediakan peralatan Konstruksi belum terdapat dalam SIJK terintegrasi, pemohon mengisi dan mengunggah dokumen melalui SIJK terintegrasi.

f. Dalam hal BUJK belum menyelesaikan penyampaian kelengkapan data sampai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran pertama kali dilakukan maka permohonan akan dihapus dan BUJK dapat mengajukan permohonan kembali.

# PERUBAHAN PERSYARATAN ADMINISTRASI

# 5.1.1. Perubahan Persyaratan Administrasi

Data Administrasi berdasarkan jenis dokumen dikategorikan menjadi:

a. Data persyaratan sertifikasi

b. Data struktur permodalan

c. Data teknis

Dalam hal dokumen data administrasi berasal dari luar negeri, maka harus dilakukan legalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Activate Wind

# 5.1.1. Perubahan Persyaratan Administrasi

## Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional

a. Data dan dokumen persyaratan sertifikasi badan usaha memuat:
   - data penjualan tahunan;
   - data kemampuan keuangan/nilai aset;
   - data ketersediaan TKK;
   - data kemampuan dalam menyediakan Peralatan konstruksi;
   - data penerapan SMAP; dan
   - data keanggotaan asosiasi BUJK yang terdaftar di LPJK.

b. data penjualan tahunan, data ketersediaan TKK, dan data kemampuan dalam menyediakan peralatan Konstruksi menggunakan data yang telah tercatat dalam SIJK terintegrasi.

c. Data kemampuan keuangan/nilai aset, data penerapan sistem manajemen anti penyuapan, dan data keanggotaan BUJK yang terdaftar di diisi dan diunggah dokumen melalui SIJK terintegrasi.

d. Dalam hal data penjualan tahunan, data ketersediaan TKK, dan data kemampuan dalam menyediakan peralatan Konstruksi belum terdapat dalam SIJK terintegrasi, pemohon mengisi dan mengunggah dokumen melalui SIJK terintegrasi.

## 5.1.1. Perubahan Persyaratan Administrasi

**Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing**

Dalam hal pemohon sertifikasi merupakan BUJK PMA, selain ketentuan persyaratan administrasi yang sama dengan BUJK, maka BUJK PMA harus memenuhi ketentuan lain sebagai berikut:

a. Badan usaha jasa konstruksi kualifikasi besar yang dibuktikan dengan sertifikat, izin usaha, atau dokumen pendukung lainnya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang di negara asal.

b. Dalam hal instansi di negara asal tidak dapat menerbitkan dokumen yang menyatakan BUJKA adalah badan usaha jasa konstruksi kualifikasi besar, BUJKA harus memiliki kemampuan keuangan **paling sedikit Rp 35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar)** untuk kegiatan usaha Pekerjaan Konstruksi, d, yang dibuktikan dengan laporan keuangan periode terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik di negara asal.

# PENJUALAN TAHUNAN

# Pekerjaan Konstruksi

## 1. Kriteria Penjualan Tahunan

1) Penjualan Tahunan dibuktikan dengan rekaman surat perjanjian kerja Konstruksi yang disahkan oleh pemilik pekerjaan dan harus dicatat sebagai pengalaman badan usaha dalam Sistem Informasi Pengalaman (SIMPAN)
2) Penjualan tahunan dapat dinilai berdasarkan akumulasi penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU paling banyak 3 (tiga) kali masa perpanjangan yang dilakukan sebelumnya secara berturut-turut atau dalam 9 (sembilan) tahun terakhir. Dihitung 9 (sembilan) tahun kebelakang sebelum surat pertanggungjawaban mutllak (tanggal BAST / PHO).
3) Pemberlakuan penilaian penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 2) dapat dijadikan dasar pelaksanaan sertifikasi badan usaha untuk 2 (dua) kali masa perpanjangan sertifikasi. Untuk Permohonan tahun 2022, penjualan tahunan yang dapat digunakan 9 tahun terakhir adalah tahun 2013. Untuk masa perpanjangan berikutnya (tahun 2025) penjualan tahunan yang dapat digunakan 9 tahun terakhir adalah tahun 2016.
4) Akumulasi penjualan tahunan 9 (sembilan) tahun dapat digunakan untuk permohonan perpanjangan, untuk perpanjangan KBLI 2017 permohonan nya masuk ke permohonan baru
5) Masa Berlaku SBU adalah selama 3 (tiga) tahun.
6) Penjualan tahunan dapat dibuktikan dengan dokumen kontrak antara BUJK dan pengguna jasa baik untuk pekerjaan yang dilakukan di dalam negeri maupun luar negeri.
7) Dalam hal kontrak kerja Konstruksi terdapat bentuk kerja sama operasional dan/atau kontrak dengan subpenyedia jasa, laporan Penjualan Tahunan dipisahkan sesuai dengan porsinya.

PERMEN PUPR NO. 8 Th. 2022 dan SK DIRJEN Bina Konstruksi No.144/KPTS/DK/2022

# 1. Pekerjaan Konstruksi

## 1. Kriteria Penjualan Tahunan

8) Pengalaman kontrak kerja konstruksi dapat digunakan untuk lebih dari 1 (satu) Subklasifikasi berdasarkan kesesuaian pekerjaan utama (major item) pada kontrak kerja konstruksi tersebut

9) Pengalaman berupa kontrak kerja konstruksi atau bagian dari kontrak kerja konstruksi yang diajukan untuk pemenuhan penjualan tahunan dalam rangka menetapkan Kualifikasi dan Subklasifikasi dilakukan terhadap setiap Subklasifikasi sesuai dengan lingkup pekerjaan konstruksi dalam rekaman kontrak kerja konstruksi

10) Dalam hal pengalaman sebagaimana angka 8) sudah digunakan pada Subklasifikasi tertentu, maka tidak dapat digunakan Kembali untuk permohonan Subklasifikasi yang berbeda.

11) Dalam hal BUJK mengajukan perpanjangan atau perubahan untuk peningkatan kualifikasi, penilaian terhadap penjualan tahunan dilakukan terhadap akumulasi penjualan pada Subklasifikasi yang sama.

Activate W

PERMEN PUPR NO. 8 Th. 2022 dan SK DIRJEN Bina Konstruksi No.144/KPTS/DK/2022

# 1. Pekerjaan Konstruksi

## 1. Kriteria Penjualan Tahunan

12) Penilaian terhadap penjualan tahunan PMA untuk pengajuan sertifikasi badan usaha baru, dapat dihitung berdasarkan pengalaman yang dimiliki BUJK pembentuk.

13) Penilaian terhadap penjualan tahunan KP-BUJKA untuk pengajuan sertifikasi badan usaha baru, dihitung berdasarkan pengalaman yang dimiliki BUJK asing pembentuk.

14) Penilaian terhadap penjualan tahunan KP-BUJKA untuk pengajuan perpanjangan SBU dihitung berdasarkan pengalaman yang diperoleh di Indonesia dengan lingkup pekerjaan yang sesuai dengan Subklasifikasinya di Indonesia dengan lingkup pekerjaan yang sesuai dengan Subklasifikasinya.

15) PMA dan KP-BUJKA dapat mengajukan permohonan E-simpan ke LPJK

**Kriteria penjualan tahunan untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi bersifat spesialis tidak dipersyaratkan nilainya namun BUJK dapat menyampaikan daftar pengalaman dan nilai penjualan tahunannya.**

PERMEN PUPR NO. 8 Th. 2022 dan SK DIRJEN Bina Konstruksi No.144/KPTS/DK/2022

# KEMAMPUAN KEUANGAN/ NILAI ASET

# 5.1.1. Persyaratan Administrasi

**Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing (PMA)**

Dalam hal pemohon sertifikasi merupakan BUJK PMA, selain ketentuan persyaratan administrasi yang sama dengan BUJK, maka BUJK PMA harus memenuhi ketentuan lain sebagai berikut:

a. Struktur permodalan:

1. BUJK asing Non-ASEAN paling banyak memiliki 67% (enam puluh tujuh persen) dari total saham pada BUJK PMA sebagai pemohon sertifikasi.
2. BUJK asing ASEAN paling banyak memiliki 70% (tujuh puluh persen) dari total saham pada BUJK PMA sebagai pemohon sertifikasi.

Activate Windows
Go to Settings to acti

# 5.1.1. Perubahan Persyaratan Administrasi

**Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing (PMA)**

b. Kriteria teknis penanam modal dalam negeri:

1. Badan Usaha Jasa Konstruksi Kualifikasi Besar yang dibuktikan dengan SBU yang masih berlaku.
2. Memiliki kegiatan usaha yang sama dengan BUJKA penanam modal asing yang dibuktikan dengan SBU yang masih berlaku.
3. Dalam hal BUJKN hanya memiliki subklasifikasi **bersifat spesialis**, BUJKN harus memiliki kemampuan keuangan **paling sedikit Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar)** untuk kegiatan usaha Pekerjaan Konstruksi bersifat spesialis, yang dibuktikan dengan laporan keuangan periode terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik.

Activate Wind

# 5.1.1. Perubahan Persyaratan Administrasi

## Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing (PMA)

c. Kriteria teknis penanam modal asing:

1. Badan Usaha Jasa Konstruksi Kualifikasi Besar yang dibuktikan dengan sertifikat, izin usaha, atau dokumen pendukung lainnya.
2. Dalam hal instansi di negara asal tidak dapat menerbitkan dokumen yang menyataka BUJKA adalah badan usaha jasa konstruksi kualifikasi besar, BUJKA harus memiliki kemampuan keuangan paling sedikit Rp 35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar) untuk kegiatan usaha Pekerjaan Konstruksi, yang dibuktikan dengan laporan keuangan periode terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik di negara asal
3. Mempunyai sertifikat bidang jasa konstruksi yang disetarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mempunyai kegiatan usaha yang sama dengan BUJKN penanam modal dalam negeri yang dibuktikan dengan sertifikat, izin usaha, atau dokumen pendukung lainnya.

Activate Wind
Go to Settings to a

# Pekerjaan Konstruksi

## 2. Kriteria Kemampuan Keuangan sifat usaha UMUM

1) Penilaian Kemampuan Keuangan diambil dari nilai total ekuitas pada neraca keuangan BUJK
2) Untuk neraca keuangan BUJK Kualifikasi kecil, dibuat oleh badan usaha
3) Untuk neraca keuangan BUJK Kualifikasi Menengah dan Besar hasil audit kantor akuntan publik yang teregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus mencantumkan QR code
4) QR Code yang terhubung ke Kementerian Keuangan, sesuai Surat Edaran Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan No. SE-4/PPPK/2021 tanggal 6 Agustus 2021
5) Dalam hal Laporan Hasil Audit Akuntan Publik belum terdapat QR Code yang terhubung ke Kementerian Keuangan, maka dapat dilihat pada daftar kantor akuntan publik aktif sesuai dengan izin Kementerian Keuangan di https://pppk.kemenkeu.go.id/in/post/daftar-kantor-akuntan-publik-aktif.
6) Dalam hal total ekuitas dinyatakan dalam mata uang asing, total ekuitas harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada saat pengajuan penetapan kualifikasi.

PERMEN PUPR NO. 8 Th. 2022 dan SK DIRJEN Bina Konstruksi No.144/KPTS/DK/2022

# Pekerjaan Konstruksi

## 2. Kriteria Kemampuan Keuangan

| BUJK Umum Kualifikasi | Kemampuan Keuangan Persubklasifikasi |
|---|---|
| Kecil | • Lebih besar atau sama dengan Rp. 300.000.000,- |
| Menengah | • Lebih besar atau sama dengan Rp. 2.000.000.000,- |
| Besar | • Untuk BUJKN/BUJK Penanam Modal Asing lebih besar atau sama dengan Rp. 25.000.000.000,-<br>• Untuk Kantor Perwakilan BUJKA lebih besar atau sama dengan Rp. 35.000.000.000,- |

# Pekerjaan Konstruksi

## 2. Kriteria Kemampuan Keuangan Sifat Usaha SPESIALIS

1) Penilaian Kemampuan Keuangan diambil dari NILAI TOTAL ASET pada neraca keuangan BUJK
2) Untuk sifat usaha spesialis, nilai aset kurang dari Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dapat dipenuhi dengan neraca keuangan yang dibuat oleh badan usaha.
5) Untuk sifat usaha spesialis, nilai aset lebih dari atau sama dengan Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dipenuhi dengan neraca keuangan yang diaudit oleh akuntan publik yang teregistrasi dan harus mencantumkan QR code.
6) QR Code yang terhubung ke Kementerian Keuangan, sesuai Surat Edaran Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan No. SE-4/PPPK/2021 tanggal 6 Agustus 2021
7) Dalam hal Laporan Hasil Audit Akuntan Publik belum terdapat QR Code yang terhubung ke Kementerian Keuangan, maka dapat dilihat pada daftar kantor akuntan publik aktif sesuai dengan izin Kementerian Keuangan di https://pppk.kemenkeu.go.id/in/post/daftar-kantor-akuntan-publik-aktif.
8) Dalam hal total aset dinyatakan dalam mata uang asing, total aset harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada saat pengajuan penetapan kualifikasi.

Activate Wind

# Pekerjaan Konstruksi

## 2. Kriteria Kemampuan Keuangan Sifat Usaha SPESIALIS

9) Untuk relaksasi **nilai asset pada spesialis lebih dari 1 subklasifikasi** digunakan **akumulasi**

10) Kemampuan keuangan/Nilai Aset untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi pada **kantor perwakilan BUJKA** bersifat spesialis **paling sedikit Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).**

11). kemampuan keuangan/Nilai Aset untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi pada **BUJK Nasional/ BUJK Penanam Modal Asing** didasarkan pada **nilai total aset** yang tertuang pada neraca keuangan badan usaha berdasarkan tabel sebagai berikut:

| No | Klasifikasi | Subklasifikasi | | | Nomor KBLI | Nilai Aset | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah | Judul | Kode | | | |
| A | Pekerjaan Umum Bersifat Spesialis | | | | | | |
| 1 | **Instalasi (IN)** | 14 | Instalasi Mekanikal | IN001 | 43291 | Rp | 5.000.000.000 |
| | | | Instalasi Telekomunikasi | IN002 | 43212 | Rp | 5.000.000.000 |
| | | | Instalasi Peralatan Infrastruktur Pertambangan dan Manufaktur | IN003 | 43299 | Rp | 5.000.000.000 |
| | | | Instalasi Minyak dan Gas | IN004 | 43223 | Rp | 5.000.000.000 |
| | | | Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai, dan Udara | IN005 | 43214 | Rp | 5.000.000.000 |
| | | | Instalasi Elektronika | IN006 | 43213 | Rp | 5.000.000.000 |
| | | | Instalasi saluran air (plambing) | IN007 | 43221 | Rp | 5.000.000.000 |
| | | | Instalasi Pendingin dan Ventilasi Udara | IN008 | 43224 | Rp | 5.000.000.000 |
| | | | Instalasi Pendingin dan Ventilasi Udara | IN009 | 43224 | Rp | 5.000.000.000 |
| | | | Instalasi Pengolahan Air Untuk Pembangkit Listrik | IN010 | 43299 | Rp | 5.000.000.000 |
| | | | Instalasi Sinyal Dan Rambu-rambu Jalan Raya | IN011 | 43216 | Rp | 5.000.000.000 |
| | | | Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api | IN012 | 43215 | Rp | 5.000.000.000 |
| | | | Instalasi Pemanas dan Geotermal | IN013 | 43222 | Rp | 5.000.000.000 |
| | | | Instalasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika | IN014 | 43292 | Rp | 5.000.000.000 |

Activate Wind
Go to Settings to a

| No | Klasifikasi | Subklasifikasi | | | Nomor KBLI | Nilai Aset | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah | Judul | Kode | | | |
| A | Pekerjaan Umum Bersifat Spesialis | | | | | | |
| 3 | **Konstruksi PraPabrikasi (KP)** | 2 | Pekerjaan konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung | KP001 | 41020 | Rp | 5.000.000.000 |
| | | | Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi bangunan sipil | KP002 | 42930 | Rp | 5.000.000.000 |
| 4 | **Penyelesaian Bangunan (PB)** | 11 | Pengerjaan Pemasangan Kaca dan Alumunium | PB001 | 43301 | Rp | 75.000.000 |
| | | | Pengerjaan Pemasangan Kaca dan Alumunium | PB002 | 43301 | Rp | 75.000.000 |
| | | | Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter dan Plafon | PB003 | 43302 | Rp | 75.000.000 |
| | | | Dekorasi Interior | PB004 | 43304 | Rp | 75.000.000 |
| | | | Pemasangan Ornamen dan Pekerjaan Seni | PB005 | 43304 | Rp | 75.000.000 |
| | | | Pemasangan Ornamen dan Pekerjaan Seni | PB006 | 43304 | Rp | 75.000.000 |
| | | | Pengecatan | PB007 | 43303 | Rp | 75.000.000 |
| | | | Pengecatan | PB008 | 43303 | Rp | 75.000.000 |
| | | | Pembersihan dan Perapihan Bangunan Gedung dan/atau Bangunan Sipil | PB009 | 43309 | Rp | 75.000.000 |
| | | | Pekerjaan Lanskap, Pertamanan, dan Penanaman Vegetasi | PB010 | 43305 | Rp | 75.000.000 |
| | | | Pemulihan Lahan Pekerjaan Konstruksi | PB011 | 43909 | Rp | 75.000.000 |

# KETERSEDIAAN TKK

# Pekerjaan Konstruksi

## 3. Persyaratan Tenaga Kerja Konstruksi

Tenaga kerja yang dipersyaratkan meliputi:

a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);

b. Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJTBU); dan

c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU).

Tenaga kerja konstruksi tersebut merupakan tenaga tetap badan usaha yang tidak boleh merangkap jabatan pada badan usaha lain.

Dalam hal BUJK memiliki beberapa subklasifikasi dengan kualifikasi berbeda, maka kualifikasi dan jenjang PJTBU mengacu subklasifikasi dengan kualifikasi tertinggi.

Activate Wind

## Pekerjaan Konstruksi

### 3. Persyaratan Tenaga Kerja Konstruksi (Bersifat Umum)

| Kualifikasi | Tenaga Kerja Konstruksi |
|---|---|
| **Kecil** | a. 1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertingg<br>b. 1 (satu) orang PJBU per Badan Usaha<br>c. 1 (satu) orang PJTBU per Badan Usaha mengikuti ketentuan teknis salah satu subklasifikasi dengan kualifikasi tertinggi yang dimiliki<br>**d. 1 (satu) orang PJTBU** dengan **SKK konstruksi kualifikasi** KKNI jabatan **teknisi/analis paling rendah jenjang 6 (enam)** atau **teknisi/analis sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi** sebagaimana diatur dalam **Lampiran I PerMen PUPR No 6 Tahun 2021**<br>**e. PJBU dapat merangkap sebagai PJTBU**<br>f. 1 (satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha |

Activate Windows
Go to Settings to activ

## Pekerjaan Konstruksi

### 3. Persyaratan Tenaga Kerja Konstruksi (Bersifat Umum)

| Kualifikasi | Tenaga Kerja Konstruksi |
|---|---|
| **Kecil** | g. **PJSKBU harus memiliki SKK konstruksi** kualifikasi KKNI **jabatan teknisi/analis paling rendah jenjang 5 (lima)** atau teknisi/analis sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana diatur dalam **Lampiran I PerMen PUPR No 6 Tahun 2021** atau **Lampiran huruf B bidang keilmuan PJSKBU PerMen PUPR No 8 Tahun 2022**<br><br>h. 1 (satu) orang PJSKBU **dapat merangkap untuk maksimal 5 (lima) Subklasifikasi dalam 1 (satu) Klasifikasi atas 1 (satu) BUJK**<br><br>i. Dalam hal persyaratan jenjang PJKSBU untuk **belum dapat dipenuhi**, PJSKBU **dapat dijabat oleh TKK lulusan sekolah menengah atas dengan pengalaman paling sedikit 4 (empat) tahun** atau **sekolah menengah kejuruan dengan pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun di bidang Jasa Konstruksi** yang **tercatat dalam SIMPAN dan memiliki SKK** |

## Pekerjaan Konstruksi

### 3. Persyaratan Tenaga Kerja Konstruksi (Bersifat Umum)

| Kualifikasi | Tenaga Kerja Konstruksi |
|---|---|
| **Kecil** | j. TKK yang menjabat sebagai **PJSKBU** sebagaiman dimaksud pada huruf I atau **yang memiliki SKK konstruksi kualifikasi KKNI jenjang 3 (tiga) harus mempunyai SKK Konstruksi kualifikasi KKNI jenjang 5 dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.**<br><br>k. Dalam hal:<br>1) Belum ada jabatan kerja sesuai dengan subklasifikasi yang dimiliki oleh BUJK yang disebabkan belum adanya LSP yang beroperasi atau belum ada LSP untuk mengampu jabatan kerja tersebut atau Panitia Teknis Uji Kompetensi belum berfungsi; atau<br><br>2) PJSKBU belum memiliki SKK konstruksi dengan lulusan sekolah menengah atas dengan pengalaman paling sedikit 4 (empat) tahun atau sekolah menengah kejuruan dengan pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun di bidang Jasa Konstruksi, maka PJSKBU harus memiliki:<br>1. surat keterangan/sertifikat pelatihan;<br>2. substansi pelatihan sebagaimana dimaksud angka 1) materi: |

Activate Windows
Go to Settings to activ

## Pekerjaan Konstruksi

### 3. Persyaratan Tenaga Kerja Konstruksi (Bersifat Umum)

| Kualifikasi | Tenaga Kerja Konstruksi |
|---|---|
| **Kecil** | substansi pelatihan sebagaimana dimaksud angka 1) materi: |

a. kebijakan Jasa Konstruksi;
b. administrasi Kontrak;
c. persiapan Pelaksanaan Proyek;
d. pelaksanaan proyek konstruksi;
e. manajemen proyek konstruksi;
f. manajemen pengusahaan;

g. sistem manajemen keselamatan konstruksi;
h. perpajakan;
i. akuntansi;
j. arus kas;
k. surety bond; dan
l. sistem manajemen mutu (SMM).

3) pelatihan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud angka 2) merupakan **pelatihan dengan periode waktu paling lama 5 (lima) tahun sebelum surat keputusan ini ditetapkan**; dan

4) surat **pernyataan kebenaran data pelatihan** yang telah diikuti.

## Pekerjaan Konstruksi

### 3. Persyaratan Tenaga Kerja Konstruksi (Bersifat Umum)

| Kualifikasi | Tenaga Kerja Konstruksi |
|---|---|
| Kecil | l. Dalam hal **LSP pengampu sudah beroperasi** maka **PJSKBU** sebagaimana dimaksud pada huruf k **wajib memiliki SKK konstruksi kualifikasi KKNI jabatan teknisi/analis paling rendah jenjang 5 (lima)** atau **teknisi/analis sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan,** sebagaimana diatur dalam **Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021** tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau<br><br>**Lampiran huruf B bidang keilmuan PJSKBU untuk masing-masing subklasifikasi usaha jasa konstruksi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08 Tahun 2022** tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi. |

Activate Wind
Go to Settings to a

## Pekerjaan Konstruksi

### 3. Persyaratan Tenaga Kerja Konstruksi (Bersifat Umum)

| Kualifikasi | Tenaga Kerja Konstruksi |
|---|---|
| **Menengah** | a. 1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi<br>b. 1 (satu) orang PJBU per Badan Usaha<br>c. 1 (satu) orang PJTBU per Badan Usaha mengikuti ketentuan teknis salah satu subklasifikasi dengan kualifikasi tertinggi yang dimiliki<br>**d. 1 (satu) orang PJTBU** dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI **jabatan ahli paling rendah jenjang 7 (tujuh)** atau **ahli muda sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi** sebagaimana diatur dalam **Lampiran I Peraturan Menteri PUPR Nomor 06 Tahun 2021**<br>e. 1 (satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha<br>**f. PJSKBU** harus memiliki SKK konstruksi kualifikasi KKNI **jabatan teknisi/analis paling rendah jenjang 6 (enam)** atau **teknisi/analis sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi** sebagaimana diatur dalam **Lampiran I Peraturan Menteri PUPR Nomor 06 Tahun 2021** atau **Lampiran huruf B bidang keilmuan PJSKBU Peraturan Menteri PUPR Nomor 08 Tahun 2022**<br>**g. 1 (satu) orang PJSKBU dapat merangkap untuk maksimal 5 (lima) Subklasifikasi dalam 1 (satu) Klasifikasi atas 1 (satu) BUJK** |

Activate Wind
Go to Settings to a

## Pekerjaan Konstruksi

### 3. Persyaratan Tenaga Kerja Konstruksi (Bersifat Umum)

| Kualifikasi | Tenaga Kerja Konstruksi |
|---|---|
| **Besar**<br>**BUJKN dan BUJK PMA** | a. 1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi<br>b. 1 (satu) orang PJBU per Badan Usaha<br>c. 1 (satu) orang PJTBU per Badan Usaha mengikuti ketentuan teknis salah satu subklasifikasi dengan kualifikasi tertinggi yang dimiliki<br>**d. 1 (satu) orang PJTBU** dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI **jabatan ahli paling rendah jenjang 8 (delapan)** atau **ahli madya** sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana diatur dalam **Lampiran I PerMen PUPR No 6 Tahun 2021**<br>e. 1 (satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha<br>**f. PJSKBU** harus memiliki SKK konstruksi kualifikasi KKNI **jabatan ahli paling rendah jenjang 7 (tujuh)** atau **ahli muda** sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana diatur dalam **Lampiran I PerMen PUPR No 6 Tahun 2021** atau **Lampiran huruf B bidang keilmuan PJSKBU PerMen PUPR No 8 Tahun 2022**<br>**g. 1 (satu) orang PJSKBU dapat merangkap untuk maksimal 5 (lima) Subklasifikasi dalam 1 (satu) Klasifikasi atas 1 (satu) BUJK** |

Activate Windows
Go to Settings to activ

## Pekerjaan Konstruksi

| 3. Persyaratan Tenaga Kerja Konstruksi (Bersifat Umum) | |
|---|---|
| Kualifikasi | Tenaga Kerja Konstruksi |
| **Besar**<br>**KP**<br>**BUJKA** | a. 1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi<br>b. 1 (satu) orang PJBU per Badan Usaha<br>c. 1 (satu) orang PJTBU per Badan Usaha mengikuti ketentuan teknis salah satu subklasifikasi dengan kualifikasi tertinggi yang dimiliki<br>**d. 1 (satu) orang PJTBU** dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI jabatan **ahli paling rendah jenjang 9 (sembilan)** atau **ahli utama** sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sebagaimana diatur dalam **Lampiran I PerMen PUPR No 6 Tahun 2021**<br>e. 1 (satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha<br>**f. PJSKBU** harus memiliki SKK konstruksi kualifikasi KKNI **jabatan ahli paling rendah jenjang 9 (sembilan)** atau **ahli utama** sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi atau memiliki sertifikat **ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer** sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana diatur dalam **Lampiran I PerMen PUPR No 6 Tahun 2021 dan Lampiran Huruf B PerMen PUPR No 8 Tahun 2022**<br>**g. 1 (satu) orang PJSKBU dapat merangkap untuk maksimal 5 (lima) Subklasifikasi dalam 1 (satu) Klasifikasi atas 1 (satu) BUJK.** |

Activate Windows
Go to Settings to activ

## Pekerjaan Konstruksi

### 3. Persyaratan Tenaga Kerja Konstruksi (Bersifat Spesialis)

| BUJK | Tenaga Kerja Konstruksi |
|---|---|
| **BUJKN/BUJK PMA** | a. 1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi<br>b. 1 (satu) orang PJBU per Badan Usaha<br>c. 1 (satu) orang PJTBU per Badan Usaha mengikuti ketentuan teknis salah satu subklasifikasi dengan kualifikasi tertinggi yang dimiliki<br>d. 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI jabatan ahli paling rendah jenjang 8 (delapan) atau ahli madya sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana diatur dalam Lampiran I PerMen PUPR No 6 Tahun 2021<br>e. 1 (satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha<br>f. PJSKBU harus memiliki SKK konstruksi kualifikasi KKNI jabatan ahli paling rendah jenjang 7 (tujuh) atau ahli muda sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana diatur dalam Lampiran I PerMen PUPR No 6 Tahun 2021 dan Lampiran Huruf B PerMen PUPR No 8 Tahun 2022<br>**g. 1 (satu) orang PJSKBU dapat merangkap untuk maksimal 5 (lima) Subklasifikasi dalam 1 (satu) Klasifikasi atas 1 (satu) BUJK** |

Activate Window
Go to Settings to activa

## Pekerjaan Konstruksi

### 3. Persyaratan Tenaga Kerja Konstruksi (Bersifat Spesialis)

| BUJK | Tenaga Kerja Konstruksi |
|---|---|
| **Kantor Perwakilan BUJKA** | a. 1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertingg<br>b. 1 (satu) orang PJBU per Badan Usaha<br>c. 1 (satu) orang PJTBU per Badan Usaha mengikuti ketentuan teknis salah satu subklasifikasi dengan kualifikasi tertinggi yang dimiliki<br>d. 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI jabatan ahli paling rendah jenjang 9 (sembilan) atau ahli utama sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sebagaimana diatur dalam Lampiran I PerMen PUPR No 6 Tahun 2021<br>e. 1 (satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha<br>f. PJSKBU harus memiliki SKK konstruksi kualifikasi KKNI jabatan ahli paling rendah jenjang 8 (delapan) atau ahli madya sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana diatur dalam Lampiran I PerMen PUPR No 6 Tahun 2021 atau Lampiran Huruf B PerMen PUPR No 8 Tahun 2022<br>**g. 1 (satu) orang PJSKBU dapat merangkap untuk maksimal 5 (lima) Subklasifikasi dalam 1 (satu) Klasifikasi atas 1 (satu) BUJK** |

Activate Windows
Go to Settings to activ

# KEMAMPUAN PERALATAN

# Pekerjaan Konstruksi

## 4. Kriteria Kemampuan Peralatan

1) Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi dapat berupa:
   a. milik sendiri yang dibuktikan dengan adanya bukti hak milik;
   **b. sewa yang dibuktikan dengan adanya bukti perjanjian sewa paling sedikit selama 1 (satu) tahun sejak pengajuan sertifikasi.**

**2) Dalam hal kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum dapat dipenuhi, maka Pemohon wajib membuat surat pernyataan komitmen akan memenuhi penyediaan peralatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak SBU diterbitkan.**

3) Bukti hak milik peralatan konstruksi dapat dibuktikan melalui:
   a. faktur penjualan;
   b. akta jual beli;
   c. kuitansi;
   d. surat hibah;
   e. perjanjian sewa; atau
   f. laporan neraca aset BUJK, atau neraca konsolidasi pada satu *holding*.

## Pekerjaan Konstruksi

### 4. Perubahan Kriteria Kemampuan Peralatan

4) Penyediaan peralatan konstruksi harus memenuhi persyaratan paling sedikit jumlah peralatan utama untuk setiap subklasifikasi.

5) Penyediaan peralatan konstruksi untuk jenis yang sama dapat digunakan untuk memenuhi peralatan utama pada Subklasifikasi lain dalam 1 (satu) Klasifikasi yang sama.

**6) Penyediaan peralatan konstruksi harus tercatat pada Sistem Informasi Material Peralatan Konstruksi (SIMPK)**

**7) Peralatan konstruksi dilakukan pengujian oleh instansi yang membidangi ketenagakerjaan di pemerintah daerah provinsi untuk memenuhi tahap dalam pencatatan peralatan konstruksi, yang dibuktikan dengan surat keterangan memenuhi syarat Kesehatan dan Keselamatan Kerja.**

**8) Dalam hal pengujian peralatan konstruksi belum dapat dilakukan oleh instansi yang membidangi ketenagakerjaan di pemerintah daerah provinsi, BUJK dapat menggunakan surat pernyataan yang dapat diunduh melalui fitur pencatatan Sumber Daya Material Peralatan Konstruksi (SDMPK) pada SIMPK.**

Activate Wind
Go to Settings to a

## Pekerjaan Konstruksi

### 4. Perubahan Kriteria Kemampuan Peralatan

Jenis peralatan yang dipersyaratkan sebagaimana yang diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Lampiran huruf C Ketentuan untuk Jenis Peralatan Utama Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi.

# Pekerjaan Konstruksi

## 4. Kriteria Kemampuan Peralatan

CONTOH

Persyaratan peralatan utama untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi bersifat umum klasifikasi bangunan gedung, subklasifikasi kontruksi gedung hunian BG001 untuk Kualifikasi Kecil :

| Kualifikasi | peralatan utama |
|---|---|
| Kecil | • paling sedikit 1 (satu) persubklasifikasi |
| **1) Permen PUPR No. 6 Tahun 2021** | • **concrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, generator set, pick up. (Lampiran 1A Permen PUPR No. 6 Tahun 2021).** |
| **2) Permen PUPR No. 8 Tahun 2022** | • **crawler crane, crew boat, hydraulic breaker, hydraulic drilling machine, prestressing equipment, video camcorder (handycam) (Lampiran B Permen PUPR No. 8 Tahun 2022)** |

# Pekerjaan Konstruksi

## 4. Kriteria Kemampuan Peralatan

CONTOH

Persyaratan peralatan utama untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi bersifat umum klasifikasi bangunan gedung, subklasifikasi kontruksi gedung hunian BG001 untuk Kualifikasi Menengah dan Besar :

| Kualifikasi | peralatan utama |
|---|---|
| Menengah | • paling sedikit 2 (dua) persubklasifikasi |
| Besar | • BUJK Nasional/BUJK Penanam Modal Asing : paling sedikit 3 (tiga) persubklasifikasi<br>• Kantor Perwakilan BUJKA: paling sedikit 5 (lima) persubklasifikasi |
| **Permen PUPR No. 6 Tahun 2021** | • **tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig borepile, dump truck, vibro roller, flatbed truck, water tank truck. (Lampiran 1A Permen PUPR No. 6 Tahun 2021).** |
| **Permen PUPR No. 8 Tahun 2022** | • **tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer,generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck (Lampiran B Permen PUPR No. 8 Tahun 2022)** |

# KOMITMEN PENERAPAN SMAP

## Pekerjaan Konstruksi

### 5. Kriteria Sistem Manajemen Anti Penyuapan (umum atau Spesialis)

a. Sertifikat penerapan SMAP yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi terakreditasi; atau

b. Dokumen penerapan SMAP; atau

c. Surat Pernyataan Komitmen akan memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen penyelenggaraan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) selambat-lambatnya 1 (satu) tahun untuk Badan Usaha kualifikasi besar, 2 (dua) tahun untuk Badan Usaha kualifikasi menengah dan spesialis, dan 3 (tiga) tahun untuk Badan Usaha kualifikasi kecil.

1. **Lembaga sertifikasi terakreditasi merupakan lembaga penilaian kesesuaian yang telah diakreditasi oleh KAN dan/atau lembaga penilaian kesesuaian yang telah diakreditasi oleh badan akreditasi yang telah menjadi anggota *International Accreditation Forum* (IAF) atau *Asia Pacific Accreditation Cooperation* (APAC) atau forum lain yang diakui sebagai *Signatory Multilateral Recognition Arrangements* (MLA) untuk skema akreditasi sistem manajemen anti penyuapan**
2. **Dokumen penerapan SMAP mengadopsi pada Panduan Cegah Korupsi yang dibuat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**

Activate W
Go to Settings

TERIMA KASIH

**Data dan Dokumen Pendaftaran**

| Jenis Data | Badan Usaha |
|---|---|
| **Data Permohonan** | 1. Jenis Usaha Badan Usaha<br>2. Sifat Usaha Badan Usaha<br>3. Nomor KBLI<br>4. Klasifikasi Usaha<br>5. Subklasifikasi Usaha<br>6. Kualifikasi Usaha<br>7. LSBU<br>8. Asosiasi Badan Usaha yang terdaftar di LPJK<br>9. Nama PIC<br>10. Email PIC<br>11. Nomor HP PIC |
| **Informasi Badan Usaha** | 1. Nama Badan Usaha<br>2. Bentuk Badan Usaha<br>3. Jenis Badan Usaha |

| Jenis Data | Badan Usaha |
|---|---|
| | 4. Alamat Badan Usaha<br>5. Kelurahan<br>6. Kecamatan<br>7. Kabupaten / Kota<br>8. Provinsi<br>9. Kode Pos<br>10. Website<br>11. Email Badan Usaha<br>12. No Telephone Badan Usaha<br>13. HP Badan Usaha<br>14. NPWP Badan Usaha<br>15. NIB |
| **Inputan Informasi Akte** | 1. Nomor Akte<br>2. Jenis Akte<br>3. Nama Notaris<br>4. Alamat Notaris<br>5. Tanggal Akte<br>6. Uraian Usaha sesuai Akte tersebut<br>7. Nomor Pengesahan SK Kumham<br>8. Modal Dasar sesuai Akte tersebut<br>9. Modal Disetor sesuai Akte tersebut |
| **Informasi Pemegang Saham** | 1. Nama<br>2. No KTP/KITAS<br>3. NPWP<br>4. Alamat<br>5. Kabupaten/Kota<br>6. Provinsi<br>7. Jumlah Saham<br>8. Nilai Satuan Saham<br>9. Modal Disetor |
| **Informasi Pengurus Badan Usaha** | 1. Nama<br>2. Alamat<br>3. No KTP/KITAS<br>4. No NPWP<br>5. Jabatan<br>6. PJBU adalah salah satu Direksi |
| **Informasi Neraca** | Data Inputan Informasi Neraca:<br><br>1. Tahun<br>2. Aset Lancar<br>3. Aset Tidak Lancar<br>4. Aset Lain Lain |

| Jenis Data | Badan Usaha |
|---|---|
| | 5. Total Aset<br>6. Kewajiban Lancar<br>7. Kewajiban Tidak Lancar<br>8. Total Kewajiban<br>9. Total Equitas<br>10. Total Kewajiban dan Ekuitas<br><br>Dokumen Upload Informasi Neraca:<br><br>1. Neraca Badan Usaha dan bermaterai<br>2. Laporan Audit Akuntan Publik untuk kualifikasi M dan B |
| **Informasi Penjualan Tahunan** | 1. Nomor Registrasi Pengalaman di SIMPAN<br>2. Nama Paket Pekerjaan<br>3. Sumber Dana<br>4. Lokasi pekerjaan<br>5. Pemberi Tugas<br>6. Nama Instansi Pemberi Tugas<br>7. Alamat Instansi Pemberi Tugas<br>8. No Telp Instansi Pemberi Tugas<br>9. Email Instansi Pemberi Tugas<br>10. Nama Pemberi Tugas<br>11. Jabatan Pemberi Tugas<br>12. No Kontrak<br>13. Tanggal Kontrak<br>14. Nilai Kontrak<br>15. Nilai Kontrak (setelah addendum)<br>16. Status KSO<br>17. Presentase Porsi<br>18. Nilai Kontrak sesuai Porsi<br>19. No BA Serah Terima<br>20. Tanggal BA Serah Terima |
| **Informasi peralatan** | Data Inputan Informasi Peralatan:<br><br>1. Kepemilikan peralatan (dalam bentuk Hak Milik atau Sewa)<br>2. Nomor Registrasi di SIMPK<br>3. Subvarian Peralatan sebagaimana dimaksud pada Permen PUPR No 7/2021 atau jenis peralatan sebagaimana dimaksud pada Permen PUPR No 6/2021<br>4. Merek<br>5. Model/Type<br>6. Kapasitas Sesuai Spesifikasi Produsen |

| Jenis Data | Badan Usaha |
|---|---|
| | 7. Kapasitas Sesuai Hasil Pengujian/ Pemeriksaan<br>8. Unit/Satuan Kapasitas sesuai dengan satuan pada dokumen hasil pengujian/pemeriksaan<br>9. Tahun Pembuatan<br>10. Tahun Pembelian<br>11. Provinsi Lokasi<br>12. Kabupaten / Kota Lokasi<br>13. Jenis Bukti Kepemilikan<br><br>Dokumen Upload Informasi Peralatan:<br>1. Bukti Kepemilikan<br>2. Hasil Pemeriksaan Pengujian<br>3. Foto Plat Nama (format jpg/jpeg dengan ukuran maksimal 200kb)<br>4. Foto Tampak Depan Peralatan (Foto Tampak Depan Peralatan dalam format jpg/jpeg dengan ukuran maksimal 200kb)<br>5. Foto Tampak Samping Peralatan (Foto Tampak Samping Peralatan dalam format jpg/jpeg dengan ukuran maksimal 200kb)<br>6. Foto Tampak Samping Peralatan (Foto Tampak Belakang Peralatan dalam format jpg/jpeg dengan ukuran maksimal 200kb) |
| **Informasi Penanggung Jawab Badan Usaha** | Data Inputan Informasi Penanggung Jawab Badan Usaha:<br>1. NIK/KTP<br>2. Nama<br>3. Nomor NPWP<br><br>Upload dokumen Informasi Penanggung Jawab Badan Usaha:<br><br>Foto PJBU (format jpg/jpeg) |
| **Informasi Penanggung Jawab Teknik** | Data Inputan Informasi Penanggung Jawab Teknik:<br><br>1. NIK/KTP<br>2. Nama<br>3. Nomor NPWP<br>4. Nomor Registrasi SKK<br>5. Klasifikasi SKK<br>6. Subklasifikasi SKK<br>7. Kualifikasi TKK lama : Ahli Muda, Ahli Madya, |

| Jenis Data | Badan Usaha |
|---|---|
| | Ahli Utama<br>8. Jenjang<br>9. Tanggal Terbit SKK<br>10. Nomor Registrasi ACPE/AA<br>11. Klasifikasi ACPE/AA |
| **Informasi Penanggung Jawab Sub Klasifikasi** | Data Inputan Informasi Penanggung Jawab Sub Klasifikasi:<br><br>1. NIK/KTP<br>2. Nama<br>3. Nomor NPWP<br>4. Nomor Registrasi SKK<br>5. Klasifikasi SKK<br>6. Subklasifikasi SKK<br>7. Kualifikasi SKK lama : Ahli Muda, Ahli Madya, Ahli Utama<br>8. Kualifikasi SKK baru : Ahli, Teknisi/Analis, Operator<br>9. Jenjang<br>10. Subklasifikasi Pengajuan SBU<br>11. Tanggal Terbit SKK<br>12. Nomor Registrasi ACPE/AA<br>13. Klasifikasi ACPE/AA |
| **Informasi SMAP** | Data Inputan Informasi SMAP:<br><br>Pemenuhan Persyaratan (Sertifikat Penerapan SMAP atau Dokumen SMAP atau Surat Pernyataan Komitmen)<br><br>Upload dokumen Informasi SMAP:<br><br>Bukti Pendukung SMAP (Sertifikat Penerapan SMAP atau Dokumen penerapan SMAP atau Surat Pernyataan Komitmen) |

**20. Format Surat Pernyataan**

**A. Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen Melalui Kepemilikan Peralatan**

**KOP BADAN USAHA**

**SURAT PERNYATAAN BADAN USAHA***

**(Khusus Untuk Pemenuhan kepemilikan peralatan konstruksi)**

Yang bertandatangan di bawah ini :

| | |
|---|---|
| Nama | : ..... |
| Nama Badan Usaha | : ..... |
| Kualifikasi | : Kecil/Menengah/Besar** |
| Alamat | : ..... |
| Telepon | : ..... |
| Jabatan | : Penanggung Jawab Badan Usaha |

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Kami akan memenuhi kebutuhan peralatan konstruksi dengan cara memiliki peralatan sebagai berikut:
   a. Klasifikasi…
   b. Subklasifikasi…
   c. Jenis peralatan…
2. Kami akan memenuhi peralatan sebagaimana dimaksud pada poin 1 dalam waktu 30 hari kalender sejak diterbitkannya Sertifikat Badan Usaha.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

....., .....202…

PT / CV .....
Penanggung Jawab
Badan Usaha

Ttd elektronik

( ..... )
Tanda tangan dan nama jelas

*format surat pernyataan terdapat dalam portal perizinan berusaha PUPR berupa persetujuan badan usaha pada kolom persetujuan (syarat dan ketentuan).
**coret salah satu

**B. Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen Melalui Penyewaan Peralatan**

**KOP BADAN USAHA**

**SURAT PERNYATAAN BADAN USAHA***

**(Khusus Untuk Penyewaan peralatan konstruksi)**

Yang bertandatangan di bawah ini :

| | |
|---|---|
| Nama | : ..... |
| Nama Badan Usaha | : ..... |
| Kualifikasi | : Kecil/Menengah/Besar** |
| Alamat | : ..... |
| Telepon | : ..... |
| Jabatan | : Penanggung Jawab Badan Usaha |

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Kami akan memenuhi kebutuhan peralatan konstruksi dengan cara menyewa peralatan sebagai berikut:
   a. Klasifikasi…
   b. Subklasifikasi…
   c. Jenis peralatan…
   d. Waktu masa penyewaan…
2. Kami akan memenuhi peralatan sebagaimana dimaksud pada poin 1 dalam waktu 30 hari kalender sejak diterbitkannya Sertifikat Badan Usaha.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

....., .....202...

PT / CV .....
Penanggung Jawab
Badan Usaha

Ttd elektronik

( ..... )
Tanda tangan dan nama jelas

*format surat pernyataan terdapat dalam portal perizinan berusaha PUPR berupa persetujuan badan usaha pada kolom persetujuan (syarat dan ketentuan).
**coret salah satu.

**C. Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen SMAP**

**KOP BADAN USAHA**

**SURAT PERNYATAAN BADAN USAHA**

Yang bertandatangan di bawah ini :

| | |
|---|---|
| Nama | : ..... |
| Nama Badan Usaha | : ..... |
| Alamat | : ..... |
| Telepon | : ..... |
| Jabatan | : Penanggung Jawab Badan Usaha |
| Sifat | : Umum/Spesialis** |
| Kualifikasi Badan Usaha | : Kecil/Menengah/Besar** |

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

1. kami akan memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen Penerapan SMAP atau sertifikat Penerapan SMAP selambat-lambatnya 1 (satu)/2(dua)/3(tiga)* tahun terhitung mulai SBU diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha.
2. apabila kami tidak dapat memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen Penerapan SMAP atau Sertifikat Penerapan SMAP sesuai waktu yang telah ditetapkan maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

....., .....202...

PT / CV .....

Penanggung Jawab

Badan Usaha

Ttd elektronik

( ..... )

Tanda tangan dan nama jelas

*format surat pernyataan terdapat dalam portal perizinan berusaha PUPR berupa persetujuan badan usaha pada kolom persetujuan (syarat dan ketentuan).
**coret salah satu.

**D. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak**

**KOP BADAN USAHA**

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....

Nama Badan Usaha : .....

Alamat : .....

Telepon : .....

Jabatan : Penanggung Jawab Badan Usaha

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Bahwa benar Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU), Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJTBU) dan Penanggung Jawab Sub Klasifikasi Badan Usaha (PJSKBU) yang diajukan bukan/tidak menjabat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan bekerja penuh waktu pada Badan Usaha kami (daftar terlampir).
2. Segala data dalam dokumen yang kami berikan adalah terbaru dan benar serta final.
3. Kami akan mematuhi segala ketentuan kode etik asosiasi, ketentuan LSBU dan LPJK serta peraturan perundangan yang berlaku, dan bersedia dikenakan sanksi bilamana kami melanggarnya.
4. Apabila dikemudian hari, ditemui bahwa dokumen-dokumen yang telah kami berikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi dan dimasukkan pada Daftar Sanksi Badan Usaha dan atau dikeluarkan dari Daftar Registrasi Badan Usaha.
5. Bilamana badan usaha kami dikenakan sanksi atas hal-hal tersebut, maka kami akan menerima ketentuan yang ditetapkan termasuk diumumkan melalui situs LSBU dan LPJK.
6. Bilamana dikemudian hari terdapat permasalahan terkait perpajakan dan hukum, sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

....., .....202...

PT / CV .....

Penanggung Jawab

Badan Usaha

Ttd elektronik atau

Ttd dengan Materai

( ..... )

Tanda tangan dan nama jelas

Lampiran Surat Pernyataan Tanggung Jawab Multak

**CONTOH DAFTAR TENAGA KERJA KONSTRUKSI**

**KBLI*** **:** .....

**KUALIFIKASI SBU** **:** .....

1. PENANGGUNG JAWAB BADAN USAHA (PJBU)

   Nama : .....

   NIK : .....

   NPWP : .....

2. PENANGGUNG JAWAB TEKNIK BADAN USAHA (PJTBU) DAN PENANGGUNG JAWAB SUBKLASIFIKASI BADAN USAHA (PJSKBU)

   2.1. DATA PJTBU

| NO | DATA / ELEMEN | PJTBU | CATATAN |
|---|---|---|---|
| 1 | NIK/KTP | | |
| 2 | Nama | | |
| 3 | Nomor NPWP | | |
| 4 | Nomor Registrasi TKK | | |
| 5 | Klasifikasi TKK | | |
| 6 | Subklasifikasi TKK | | |
| 7 | Kualifikasi TKK | | Kualifikasi TKK lama: Ahli Muda, Ahli Madya, Ahli Utama |
| 8 | Jenjang | | Jenjang untuk TKK subklasifikasi baru |
| 9 | Tanggal Terbit TKK | | |
| 10 | Nomor Registrasi ACPE/AA | | |
| 11 | Klasifikasi ACPE/AA | | |

2.2. DATA PJSKBU

Subklasifikasi SBU:

| NO | DATA / ELEMEN | PJSKBU 1 | CATATAN |
|---|---|---|---|
| 1 | NIK/KTP | | |
| 2 | Nama | | |
| 3 | Nomor NPWP | | |
| 4 | Nomor Registrasi TKK | | |
| 5 | Klasifikasi TKK | | |
| 6 | Subklasifikasi TKK | | |
| 7 | Kualifikasi TKK | | Kualifikasi TKK lama: Ahli Muda, Ahli Madya, Ahli Utama |
| 8 | Jenjang | | Jenjang untuk TKK subklasifikasi baru |
| 9 | Tanggal Terbit TKK | | |
| 10 | Nomor Registrasi ACPE/AA | | |
| 11 | Klasifikasi ACPE/AA | | |

Subklasifikasi SBU:

| NO | DATA / ELEMEN | PJSKBU 2 | CATATAN |
|---|---|---|---|
| 1 | NIK/KTP | | |
| 2 | Nama | | |
| 3 | Nomor NPWP | | |
| 4 | Nomor Registrasi TKK | | |
| 5 | Klasifikasi TKK | | |
| 6 | Subklasifikasi TKK | | |
| 7 | Kualifikasi TKK | | Kualifikasi TKK lama: Ahli Muda, Ahli Madya, Ahli Utama |
| 8 | Jenjang | | Jenjang untuk TKK subklasifikasi baru |
| 9 | Tanggal Terbit TKK | | |
| 10 | Nomor Registrasi ACPE/AA | | |
| 11 | Klasifikasi ACPE/AA | | |

dst...

PT / CV .....

Penanggung Jawab

Badan Usaha

Ttd elektronik

( ..... )

Tanda tangan dan nama jelas

*sesuai dengan Lampiran II Tabel Kode KBLI

**E. Surat Perjanjian Sertifikasi**

**SURAT PERJANJIAN SERTIFIKASI**

Nomor : .....

Perjanjian ini dibuat pada hari **.....** tanggal **..... (....)**, bulan **..... (...)**, tahun **..... (.....)** oleh dan antara:

1. **.....**, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku ..... BUJK berkedudukan di Jalan....., untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**, dan:
2. **.....,** bertindak dalam kedudukannya selaku LSBU, berkedudukan di ....., untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

**MENGINGAT**

- BAHWA **Pihak Pertama** adalah Lembaga Independen yang merupakan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang berwenang memberikan jasa Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi berdasarkan ..... Nomor : ..... Tahun 20....
- BAHWA **Pihak Kedua** adalah pihak yang memerlukan dan berkehendak untuk menggunakan jasa **Pihak Pertama,** untuk mendapatkan **Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi**, dari **Pihak Pertama**.
- Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, para pihak mengadakan Perjanjian Kerja dengan syarat-syarat dan kondisi-kondisi sebagai berikut:

**PASAL 1: Ruang Lingkup Pemberian Jasa**

1) Atas permintaan **Pihak Kedua, Pihak Pertama** dengan ini sepakat untuk melakukan jasa sertifikasi BUJK **Pihak Kedua** berdasarkan.....tentang ....., guna memperoleh Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi berdasarkan syarat- syarat dan kondisi-kondisi sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Sertifikasi ini;
2) **Pihak Pertama** akan menggunakan tenaga **Asesor Badan Usaha** yang berkualitas, memiliki sertifikat Asesor Badan Usaha dan kompeten, independen dan dijamin dapat menjaga kerahasiaan **Pihak Kedua**, dalam melaksanakan Jasa Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi;

3) **Pihak Pertama** akan melaksanakan evaluasi/penilaian kesesuaian pada sistem usaha jasa konstruksi berdasarkan permohonan sertifikasi dari Pihak Kedua, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh LSBU……;
4) **Tinjauan permohonan sertifikasi** akan dilakukan **Pihak Pertama,** setelah **Pihak Pertama** menerima kelengkapan dokumen **Pihak Kedua**, dan telah memenuhi kecukupan dokumen, kemudian akan dilanjutkan dengan tahap evaluasi dan penilaian kesesuaian oleh **Pihak Pertama**;
5) **Tahap evaluasi dan penilaian kesesuaian** dilaksanakan oleh **Pihak Pertama** setelah **pihak kedua** menandatangani perjanjian ini.

**PASAL 2: Kewajiban Para Pihak**

1) Kewajiban **Pihak Pertama** adalah:
   a. Menyediakan Asesor Badan Usaha yang sesuai kompetensi, independen dan tidak bersikap memihak dalam melaksanakan tugasnya;
   b. Menjamin setiap Asesor Badan Usaha yang ditugaskan dapat menjaga kerahasiaan seluruh data dan tidak mengungkapkan informasi kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan **Pihak Kedua** ;
   c. Menerbitkan Sertifikat
   d. Mengembalikan dokumen sertifikasi apabila **Pihak Kedua** dibekukan, dicabut atau dihentikan sertifikasinya;
   e. Menyelesaikan proses penanganan keluhan dan banding;

2) Kewajiban **Pihak Kedua** adalah:
   a. Memenuhi semua persyaratan sertifikasi sesuai dengan yang ditetapkan oleh **Pihak Pertama** ;
   b. Memenuhi semua persyaratan kesesuaian berdasarkan……
   c. Memberi akses informasi dan fasilitas yang diperlukan oleh **Pihak Pertama** dalam pelaksanaan sertifikasi, evaluasi dan surveilen serta penyelidikan terhadap pengaduan atau partisipasi masyarakat jika diperlukan;
   d. Memberitahukan kepada **Pihak Pertama** mengenai perubahan organisasi dan manajemen, legalitas, sistem mutu, atau perubahan apapun yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk memenuhi standar persyaratan sertifikasi;
   e. Menghentikan penggunaan iklan yang berisi referensi apapun, apabila terjadi pembekuan, pencabutan atau penghentian sertifikasi;

f. Menjaga reputasi **Pihak Pertama** dengan menggunakan sertifikat yang diterbitkan oleh **Pihak Pertama** sesuai aturannya dan tidak membuat pernyataan yang menyesatkan atau tidak sah terkait dengan hasil sertifikasi;
g. Memberitahu **Pihak Pertama** apabila memberikan salinan dokumen sertifikasi secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak lain;
h. Memelihara rekaman seluruh keluhan yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan sertifikasi termasuk tindakan yang diambil untuk menyelesaikan keluhan dan memberikan kepada **Pihak Pertama** jika diperlukan.

**PASAL 3: Sertifikasi**

1) Pelaksanaan Sertifikasi dilakukan **Pihak Pertama,** setelah **Pihak Kedua** memenuhi persyaratan sertifikasi;
2) Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi hanya akan diberikan kepada **Pihak Kedua**, bilamana berdasarkan hasil evaluasi/penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh **Pihak Pertama** ternyata bahwa kemampuan usaha yang dimiliki oleh **Pihak Kedua** telah memenuhi kesesuaian dengan kelayakan kemampuan usaha;
3) Sertifikat tidak akan diberikan kepada **Pihak Kedua**, bilamana berdasarkan hasil evaluasi/penilaian kesesuaian **Pihak Pertama**, ternyata bahwa kemampuan usaha yang dimiliki oleh **Pihak Kedua** tidak bersesuaian dengan kriteria penilaian.

**PASAL 4: Masa Berlaku Sertifikat**

1) Sertifikat berlaku untuk jangka waktu **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal diterbitkan;
2) **Pihak Kedua** dapat mengajukan sertifikasi ulang kepada **Pihak Pertama**, 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku sertifikat habis.

**PASAL 5: Surveilen**

1) **Pihak Pertama** dapat melakukan pengawasan insidental ke lokasi **Pihak Kedua** selama masa berlakunya sertifikat;
2) Jika saat pengawasan insidental dilakukan, ditemukan ketidaksesuaian pada pemenuhan persyaratan sertifikasi, maka **Pihak Pertama** akan memberikan kesempatan kepada **Pihak Kedua** untuk memperbaikinya;

3) Bilamana **Pihak Kedua** tidak juga memperbaiki ketidaksesuaian sebagaimana jangka waktu yang telah disepakati, **Pihak Pertama** akan mengenakan sanksi berupa pembekuan Sertifikat yang telah diberikan oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**;
4) Bilamana ternyata bahwa **Pihak Kedua** tidak juga melakukan perbaikan dalam batasan waktu yang diberikan, maka **Pihak Pertama** akan mencabut sertifikat yang diberikan kepada **Pihak Kedua;**
5) **Pihak Pertama** akan memberi kesempatan kepada **Pihak Kedua** untuk menunda jadwal pengawasan berkala jika terjadi keadaan yang bersifat ***Force Major*.**

**PASAL 6: Pembiayaan dan Cara Pembayaran**

1) Untuk setiap permohonan sertifikasi, **Pihak Kedua** dikenakan biaya sebesar Rp. .....,- ( ..... ), sudah termasuk Pajak;
2) Biaya sertifikasi sebagaimana disebut pada ayat 1 merupakan nilai bersih yang diterima oleh **Pihak Pertama**, dan **Pihak Kedua** tidak berhak memotong Pajak Jasa sertifikasi. Untuk itu **Pihak Pertama** akan menunjukan bukti potong dari Kantor Pelayanan Pajak .....;
3) Sebelum pelaksanaan evaluasi/penilaian kesesuaian, **Pihak kedua** harus melunasi biaya sertifikasi dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak data dinyatakan lengkap;
4) **Pihak Pertama** harus melakukan penilaian kesesuaian paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah **Pihak Kedua** membayar biaya sertifikasi.
5) Biaya Akomodasi dan Transportasi (termasuk makan dan kebutuhan selama surveilen) ditanggung oleh **Pihak Kedua**. Dan apabila biaya tersebut direimburst oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**, maka wajib disertakan bukti-bukti asli;
6) Apabila dilakukan pengawasan insidental/surveilen biaya pengawasan dibebankan kepada **Pihak Kedua.** Biaya pengawasan mencakup biaya surveilen, akomodasi, dan transportasi;
7) Pembayaran oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** dilakukan dengan cara transfer bank yang ditujukan kepada **Pihak Pertama** pada bank dan dengan nomor rekening sebagai berikut:

   **.....**, No. Rek :**..... - BANK .....**.

**PASAL 7: Jaminan Sertifikat dan kerahasiaan**

1) Dalam melakukan jasa sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini, **Pihak Pertama** tidak memberikan jaminan bahwa **Pihak Kedua** akan berhasil memperoleh Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi. Sertifikat akan diberikan apabila **Pihak Kedua** telah memenuhi persyaratan administrasi maupun pemenuhan persyaratan sertifikasi yang ditetapkan;
2) **Pihak Pertama** menjamin segala kerahasiaan sertifikasi yang dilakukan terhadap **Pihak Kedua** dari pihak manapun, kecuali kepada otoritas kompeten LSBU Jasa Konstruksi sesuai persyaratan.

**PASAL 8: Liabilitas**

1) **Pihak Pertama** memberikan jaminan kerugian yang timbul akibat evaluasi/penilaian kesesuaian, seperti kecerobohan yang dilakukan oleh Asesor Badan Usaha **Pihak Pertama** selama berada di lokasi **Pihak Kedua** atau karena kelalaian, maka **Pihak Pertama** akan membayar kerugian maksimal sebesar biaya sertifikasi yang telah dibayarkan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama**;
2) Bilamana terjadi perselisihan, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya sebagaimana tercantum pada Pasal 10 Perjanjian ini.

**PASAL 9: Pemakaian Sertifikat**

1) **Pihak Kedua** wajib setelah memperoleh Sertifikat, mempertahankan dan memelihara persyaratan sertifikasi sesuai dengan Pedoman Penerapannya;
2) Dalam penggunaan sertifikat oleh **Pihak Kedua** tidak diperkenankan membuat pernyataan yang menyesatkan orang berkenaan dengan pelaksanaan sertifikasi.

**PASAL 10: Perselisihan**

Semua sengketa yang timbul dari atau berkenaan dengan perjanjian sertifikasi ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai dalam waktu 30 hari setelah sengketa ini diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang satu kepada pihak lainnya, akan diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) oleh arbiter-arbiter yang ditunjuk menurut peraturan tersebut. Biaya Arbitrase tersebut dipikul bersama secara proporsional oleh masing-masing Pihak.

**PASAL 11: Lain-lain**

1) Hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini, apabila dipandang perlu akan diatur kemudian melalui Kesepakatan;
2) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

....., ..... 20....

| **PIHAK PERTAMA** | **PIHAK KEDUA** |
| --- | --- |
| Materai & Stampel | Materai & Stampel |
| ..... | ..... |

**HASIL CEK PENINJAUAN KELENGKAPAN BADAN USAHA**
**PEKERJAAN KONSTRUKSI**

**DATA PERMOHONAN SERTIFIKASI** :

Jenis Usaha :
Sifat Usaha :
Nomor KBLI :
Klasifikasi Usaha :
Subklasifikasi Usaha :
Kualifikasi Usaha :
LSBU :
Asosiasi :
Nama PIC :
Email PIC :
Nomor HP PIC :

**DATA BADAN USAHA :**

Nama Badan Usaha :
Bentuk Badan Usaha :
Jenis Badan Usaha :
Alamat Badan Usaha :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
Kode Pos :
Website :
Email Badan Usaha :
Telepon Badan Usaha :
Hp Badan Usaha :
NPWP Badan Usaha :
NIB :

| No | Persyaratan | | Dokumen | | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kelengkapan | | Verifikasi | | |
| | | | Ada | Tidak Ada | Ada | Tidak Ada | |
| 1. | Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Badan Usaha | | | | | | |
| 2. | **INPUTAN INFORMASI AKTE** | | | | | | |
| | Nomor Akte | | | | | | |
| | Jenis Akte | | | | | | |
| | Nama Notaris | | | | | | |
| | Alamat Notaris | | | | | | |
| | Tanggal Akte | | | | | | |
| | Uraian Usaha Sesuai Akte Tersebut | | | | | | |
| | Nomor Pengesahan Akte SK Kumham | | | | | | |
| | Modal Dasar Sesuai Akte Tersebut | | | | | | |
| | Modal Disetor Sesuai Akte Tersebut | | | | | | |
| 3. | **INFORMASI PEMEGANG SAHAM** | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Nama | | | | | | |
| | No KTP / KITAS | | | | | | |
| | NPWP | | | | | | |
| | Alamat | | | | | | |
| | Kabupaten Kota | | | | | | |
| | Provinsi | | | | | | |
| | Jumlah Saham | | | | | | |
| | Nilai Satuan Saham | | | | | | |
| | Modal Disetor | | | | | | |
| 4. | **INFORMASI PENGURUS BADAN USAHA** | | | | | | |
| | Nama | | | | | | |
| | Alamat | | | | | | |
| | No. KTP/KITAS | | | | | | |
| | NPWP | | | | | | |
| | Jabatan | | | | | | |
| | Nama | | | | | | |
| | PJBU adalah salah Satu Direksi | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5.** | **INFORMASI NERACA** | | | | | | | |
| | **DATA INPUTAN INFORMASI NERACA** | | | | | | | |
| | Tahun | | | | | | | |
| | Aset Lancar | | | | | | | |
| | Aset Tidak Lancar | | | | | | | |
| | Aset Lain – Lain | | | | | | | |
| | Total Aset | | | | | | | |
| | Kewajiban Lancar | | | | | | | |
| | Kewajiban Tidak Lancar | | | | | | | |
| | Total Kewajiban dan Ekuitas | | | | | | | |
| | **DOKUMEN UPLOAD INFORMASI NERACA** | | | | | | | |
| | Neraca Badan Usaha dan Bermaterai | | | | | | | |
| | Laporan Audit Akuntan Publik Untuk Kualifikasi M dan B | | | | | | | |
| **6.** | **INFORMASI PENJUALAN TAHUNAN** | | | | | | | |
| | Momor Registrasi Pengalaman di SIMPAN | | | | | | | |
| | Nama Paket Pekerjaan | | | | | | | |
| | Sumber Dana | | | | | | | |
| | Lokasi Pekerjaan | | | | | | | |
| | Pemberi Tugas | | | | | | | |
| | Nama Instasi Pemberi Tugas | | | | | | | |
| | Alamat Instasi Pemberi Tugas | | | | | | | |
| | No Telp Instasi Pemberi Tugas | | | | | | | |
| | Email Instasi Pemberi Tugas | | | | | | | |
| | Nama Pemberi Tugas | | | | | | | |
| | Jabatan Pemberi Tugas | | | | | | | |
| | No Kontrak | | | | | | | |
| | Tanggal Kontrak | | | | | | | |
| | Nilai Kontrak | | | | | | | |
| | Nilai Kontrak (Setelah Addendum) | | | | | | | |
| | Status KSO | | | | | | | |
| | Presentasi Porsi | | | | | | | |
| | Nilai Kontrak Sesuai Porsi | | | | | | | |
| | NO BA Serah Terima | | | | | | | |
| | Tanggal BA Serah Terima | | | | | | | |
| **7.** | **INFORMASI PERALATAN** | | | | | | | |
| | **DATA INPUTAN PERALATAN** | | | | | | | |
| | Data Inputan Informasi Peralatan: | | | | | | | |
| | Kepemilikan peralatan (dalam bentuk Hak Milik atau Sewa) | | | | | | | |
| | Nomor Registrasi di SIMPK | | | | | | | |
| | Subvarian Peralatan sebagaimana dimaksud pada Permen PUPR No 7/2021 | | | | | | | |
| | Merek | | | | | | | |
| | Model/Type | | | | | | | |
| | Kapasitas Sesuai Spesifikasi Produsen | | | | | | | |
| | Kapasitas Sesuai Hasil Pengujian/ Pemeriksaan | | | | | | | |
| | Unit/Satuan Kapasitas sesuai dengan satuan pada dokumen hasil | | | | | | | |
| | Tahun Pembuatan | | | | | | | |
| | Tahun Pembelian | | | | | | | |
| | Provinsi Lokasi | | | | | | | |
| | Kabupaten / Kota Lokasi | | | | | | | |
| | Jenis Bukti Kepemilikan | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **DOKUMEN UPLOAD INFORMASI PERALATAN** | | | | | | | |
| | Bukti Kepemilikan | | | | | | | |
| | Hasil Pemeriksaan Pengujian | | | | | | | |
| | Foto Plat Nama (format jpg/jpeg dengan ukuran maksimal 200kb) | | | | | | | |
| | Foto Tampak Depan Peralatan (Foto Tampak Depan Peralatan dalam format jpg/jpeg dengan ukuran maksimal 200kb) | | | | | | | |
| | Foto Tampak Samping Peralatan (Foto Tampak Samping Peralatan dalam format jpg/jpeg dengan ukuran maksimal 200kb) | | | | | | | |
| | Foto Tampak Samping Peralatan (Foto Tampak Belakang Peralatan dalam format jpg/jpeg dengan ukuran maksimal 200kb) | | | | | | | |
| | **DOKUMEN UPLOAD PEMENUHAN PERALATAN** | | | | | | | |
| | Surat Peryantaan Pemenuhan Peralatan | | | | | | | |
| **8.** | **INFORMASI PENANGGUNG JAWAB BADAN USAHA** | | | | | | | |
| | **DATA INPUTAN INFORMASI PENANGGUNG JAWAB BADAN USAHA:** | | | | | | | |
| | NIK/KTP | | | | | | | |
| | Nama | | | | | | | |
| | Nomor NPWP | | | | | | | |
| | **UPLOAD DOKUMEN INFORMASI PENANGGUNG JAWAB BADAN USAHA:** | | | | | | | |
| | Foto PJBU (Format JPG/JPEG) | | | | | | | |
| **9.** | **INFORMASI PENANGGUNG JAWAB TEKNIK** | | | | | | | |
| | **DATA INPUTAN INFORMASI PENANGGUNG JAWAB TEKNIK:** | | | | | | | |
| | NIK/KTP | | | | | | | |
| | Nama | | | | | | | |
| | Nomor NPWP | | | | | | | |
| | Nomor Registrasi SKK | | | | | | | |
| | Klasifikasi SKK | | | | | | | |
| | Subklasifikasi SKK | | | | | | | |
| | Kualifikasi TKK lama : Ahli Muda, Ahli Madya, Ahli Utama | | | | | | | |
| | Jenjang | | | | | | | |
| | Tanggal Terbit SKK | | | | | | | |
| | Nomor Registrasi ACPE/AA | | | | | | | |
| | Klasifikasi ACPE/AA | | | | | | | |
| **10.** | **INFORMASI PENANGGUNG JAWAB SUB KLASIFIKASI** | | | | | | | |
| | Data Inputan Informasi Penanggung Jawab Sub Klasifikasi: | | | | | | | |
| | NIK/KTP | | | | | | | |
| | Nama | | | | | | | |
| | Nomor NPWP | | | | | | | |
| | Nomor Registrasi SKK | | | | | | | |
| | Klasifikasi SKK | | | | | | | |
| | Subklasifikasi SKK | | | | | | | |
| | Kualifikasi SKK lama : Ahli Muda, Ahli Madya, Ahli Utama | | | | | | | |
| | Kualifikasi SKK baru : Ahli, Teknisi/Analis, Operator | | | | | | | |
| | Jenjang | | | | | | | |
| | Subklasifikasi Pengajuan SBU | | | | | | | |
| | Tanggal Terbit SKK | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nomor Registrasi ACPE/AA | | | | | | | |
| | Klasifikasi ACPE/AA | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **11.** | **INFORMASI SMAP** | | | | | | | |
| | **DATA INPUTAN INFORMASI SMAP:** | | | | | | | |
| | Pemenuhan Persyaratan (Sertifikat Penerapan SMAP atau Dokumen SMAP atau Surat Pernyataan Komitmen) | | | | | | | |
| | **UPLOAD DOKUMEN INFORMASI SMAP:** | | | | | | | |
| | Bukti Pendukung SMAP (Sertifikat Penerapan SMAP atau Dokumen penerapan SMAP atau Surat Pernyataan Komitmen) | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Jakarta…….

**PENINJAU**

**NAMA PENINJAU**